

ADB BERIKAN BANTUAN \$428 JUTA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

JAKARTA, INDONESIA (23 November 2006) – ADB akan membantu Indonesia melaksanakan pembaruan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Program Reformasi Infrastruktur akan menyediakan dana lebih dari \$428 juta dalam bentuk pinjaman dan hibah kepada pemerintah Indonesia guna membantu memperbaiki iklim investasi dan mendapatkan dukungan investasi dari sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar di Indonesia. Dana tersebut akan ditambah dengan dana hibah sebesar \$7,6 juta dari pemerintah Belanda untuk fasilitas pengembangan proyek infrastruktur.

“Indonesia memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang dinamis di tahun-tahun mendatang,” kata Rajat M. Nag, Direktur Jendral ADB untuk wilayah Asia Tenggara. “Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan melepaskan orang dari kemiskinan.”

Sebelum krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1990-an, Indonesia mengalokasikan sekitar 6% dari Produk Domestik Bruto untuk infrastruktur. Saat ini, angka tersebut turun menjadi sekitar 2% dan ini sangat berdampak pada perekonomian Indonesia.

Di Indonesia saat ini, sekitar 50 juta penduduk tidak mempunyai akses untuk mendapatkan air bersih, 90 juta penduduk tidak mendapatkan listrik dan hampir 200 juta penduduk tidak memiliki akses langsung ke jaringan telpon dan saluran pembuangan limbah.

Kaum miskin paling terpuak akibat kurangnya infrastruktur. Jalan-jalan yang buruk menyebabkan orang-orang tetap miskin karena membuat mereka tidak bisa mendapatkan peluang ekonomi. Hampir satu dari lima desa-desa di Indonesia tidak bisa diakses selama beberapa waktu dalam satu tahun.

Pemerintah memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan investasi sekitar \$65 miliar untuk pembangunan infrastruktur dalam lima tahun kedepan,

dimana \$25 miliar diantaranya akan didanai dari anggaran belanja dan pendapatan negara, \$14 miliar dari dana bank, pensiun dan asuransi domestik, \$10 miliar dari donor bilateral dan multilateral dan \$16 miliar dari investor swasta.

Program Reformasi Infrastruktur akan membantu Indonesia memperbaharui berbagai kebijakan, undang-undang, dan tata kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dari sektor swasta. Program ini juga akan memperjelas tanggung jawab pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur

"Harus diakui bahwa pemerintah saja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan investasi. Sektor swasta menghendaki arena persaingan yang adil antara sektor swasta dan publik, kejelasan kerangka hukum, dan transparansi dalam proses tender," kata Ramesh Subramaniam, Ekonom Utama ADB di Jakarta. "Program ini akan membantu pemerintah melaksanakan pembaruan yang menyangkut aspek-aspek penting ini."

Program ini rencananya akan dilaksanakan dalam bentuk kluster yang terdiri dari 3 sub-program. Sub-program yang pertama akan didukung oleh pinjaman sebesar \$400 juta dari ADB. Dana pinjaman berasal Ordinary Capital Resources, yang merupakan dana investasi ADB, dengan masa pembayaran 15 tahun termasuk masa tenggang pembayaran selama tiga tahun dengan bunga mengikuti standar LIBOR. Jumlah bantuan untuk sub-program berikutnya hingga 2010 akan ditentukan sesuai kebutuhan dan kemajuan yang dicapai dalam program ini.

Salah satu hal penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur adalah kualitas persiapan proyek. Diluar pinjaman program sebesar \$400 juta, ADB juga menyediakan dana pinjaman lunak dari Asian Development Fund sebesar \$26.5 juta untuk membantu pemerintah membentuk fasilitas pengembangan proyek infrastruktur. Fasilitas tersebut ditujukan untuk menyiapkan proyek infrastruktur secara baik sehingga bisa mendapatkan pendanaan dari investor dengan menggunakan sistem tender yang transparan.

Dana pinjaman lunak ini memiliki masa pembayaran 32 tahun termasuk masa tenggang pembayaran selama delapan tahun dengan bunga sebesar 1% per tahun selama masa tenggang dan 1,5% per tahun setelah masa tersebut.

Di dalam program ini ADB juga menyediakan hibah sebesar \$2 juta untuk membantu pemerintah menerapkan kerangka manajemen resiko dalam pendanaan pembangunan infrastruktur.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Dewan Direksi ADB baru-baru ini menyetujui strategi dan program ADB di Indonesia untuk 4 tahun kedepan dengan dana pinjaman sekitar \$3,36 miliar dan hibah sebesar \$47,6 juta. Bantuan ADB akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor keuangan, penguatan otonomi daerah, mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) dan perlindungan lingkungan hidup.

ADB bermarkas di Manila. Lembaga ini mempunyai misi untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin, pembangunan social, dan tata kelola pemerintahan yang baik. ADB didirikan pada tahun 1966 dan dimiliki oleh 66 negara dimana 47 diantaranya berada di kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2005 ADB menyetujui pinjaman dan hibah untuk proyek sebesar \$6,95 miliar dan bantuan teknis sebesar \$198.8 juta.